

**PEMBERDAYAAN JURU PARKIR
MELALUI SISTEM PARKIR BERLANGGANAN
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Fahrul Rasyid Sitompul

NPP. 32.0067

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: fahrulrasyad23@hmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The limited parking space available in the city of Medan often causes various problems such as a high number of illegal parking by the public, traffic congestion, illegal parking charges, and disputes over parking spaces by parking attendants. **Objective:** To analyze the impact of empowering parking attendants on the sustainability of the subscription parking system implemented by the Medan City Government. **Method:** Using an inductive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. Analysis using the Human Resource Empowerment theory by (Priansa, 2016) with a total of 17 informants. **Results:** The research shows that the empowerment of parking attendants through a subscription parking system plays a very effective role in the policies of the Medan City Government. This empowerment is carried out by providing various trainings such as education, wages/salaries, and facilities to support parking attendants in carrying out their duties. Thus, after this empowerment is implemented, it has proven capable of addressing various issues that occurred previously, even though there are several obstacles and challenges that need to be evaluated in the future, such as achieving the Medan City's PAD target, delays in wage payments, and still having parking attendants collecting parking fees directly from users. **Conclusion:** Empowering Parking Attendants has proven to be effective in implementing the subscription parking system organized by the Medan City Government. Although there are several things that need to be evaluated such as the achievement of PAD targets, delays in wage payments, and there are still officers collecting parking fees directly from parking service users.

Keywords: Enablement, Subscription Parking

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Keterbatasan lahan parkir yang ada di Kota Medan sering menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti banyaknya masyarakat yang melakukan parkir liar, kemacetan, pengutipan liar, dan perebutan lahan parkir oleh petugas juru parkir. **Tujuan:** Untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan juru parkir terhadap keberlangsungan program sistem parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif induktif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori Pemberdayaan Sumber Daya Manusia oleh (Priansa, 2016) dengan jumlah informan sebanyak 17 orang. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan juru parkir melalui sistem parkir berlangganan berperan sangat efektif terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan. Pemberdayaan juru parkir ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai pembekalan seperti diklat, upah/gaji, dan perlengkapan fasilitas kepada petugas juru parkir untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, setelah dilakukannya pemberdayaan ini terbukti mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sebelumnya walaupun ada beberapa hambatan dan kendala yang harus dievaluasi dikemudian hari, seperti pencapaian target PAD Kota Medan, keterlambatan dalam pemberian upah, dan masih adanya petugas parkir yang mengutip uang parkir secara langsung kepada pengguna jasa parkir. **Kesimpulan:** Pemberdayaan Juru Parkir terbukti efektif untuk menjalankan sistem parkir berlangganan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan. Meskipun ada beberapa hal yang harus dievaluasi seperti pencapaian target PAD, keterlambatan dalam pemberian upah, dan masih ada petugas yang mengutip uang parkir langsung kepada pengguna jasa parkir.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Parkir Berlangganan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern ((Jacob, 2025). Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat, ditandai dengan pertumbuhan angka penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja memberikan sinyal kepada pemerintah sebagai bentuk peringatan untuk membuat sebuah terobosan atau inovasi yang dapat memenuhi berbagai tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan publik tersebut. ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital ((Valdivia, 2022). Khususnya untuk Kota Medan sendiri, Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, bahkan termasuk ke dalam kota terbesar nomor tiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya.

Jumlah penduduk yang bertambah seiring berjalannya waktu membuat kebutuhan akan pelayanan publik semakin meningkat pesat. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Kota Medan sendiri terbagi menjadi 21 wilayah kecamatan dan 151 wilayah kelurahan sehingga total luas wilayahnya sekitar 265.000 km² dengan perkiraan jumlah penduduk saat ini sekitar 2.478.145 jiwa yang terus berkembang dengan kepadatan mencapai 9.352 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Medan ditandai dari berbagai faktor pokok dan pendukung, adapun faktor pokok yang terjadi adalah meningkatnya angka kelahiran penduduk setiap tahun dan salah satu faktor pendukungnya adalah perpindahan penduduk yang datang dari luar kota dan menetap di Kota Medan.

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah dari segi ketersediaan lahan parkir yang ada di Kota Medan. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan berkurangnya lahan pemukiman penduduk, membuat kebutuhan terhadap lahan parkir tidak sebanding dengan kapasitas lahan parkir yang tersedia.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Maraknya kasus parkir liar yang sering menjadi penyebab kemacetan dan pengutipan liar di Kota Medan tidak jarang terjadi sehingga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai kerusakan. Dengan demikian, kedua permasalahan tersebut menyebabkan kerugian dari berbagai pihak yang ada. Setidaknya ada beberapa kasus kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan lahan parkir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Senin 21 Februari 2022, “Setidaknya ada dua ormas di Kota Medan, Sumatera Utara yang bentrok. Bentrokan ini dipicu lantaran berebut lahan parkir yang sudah dijaga oleh petugas elektronik parkir atas perintah Wali Kota Medan Bobby Nasution. Tidak hanya saling serang, kedua ormas ini mempersenjatai diri mereka dengan batu dan kayu.” (*Sumber: News.com*)

Kamis 3 Oktober 2024, polisi telah menangkap 3 orang yang diduga sebagai pembunuh juru parkir berinisial JL (30) yang tewas di dalam becak motor di Simpang Pemda, Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. “Ada tiga terduga pelaku yang sudah diamankan, tapi status mereka masih diperiksa.” Kata Kepala polsek Sunggal, Bambang Gunanti Hutabarat, saat dihubungi *Kompas.com* Kamis 3 Oktober 2024.

“Juru Parkir liar di Jalan Irian Barat membuat keonaran, ngajak duel petugas Dishub dan nyaris baku hantam,” Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis ketika dikonfirmasi melalui wawancara, menyebutkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Dia menyebutkan bahwa pria yang diduga juru parkir liar tersebut merasa lahan parkir itu merupakan miliknya.

Maraknya aksi pungutan liar juga sering terjadi di berbagai lokasi pinggir jalan yang ada di Kota Medan. Salah satunya adalah kejadian pungutan liar yang terjadi di kawasan Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tepatnya

di depan Polsek Medan Timur. Pada peristiwa ini, pengendara mobil tersebut bercerita tentang pengalamannya saat parkir di pinggir jalan. Dia menyebutkan bahwa pada saat itu dirinya dimintai uang sebesar Rp.20.000 untuk biaya parkir. “Kalian kalau mau parkir di depan Center Point yang di depan Polsek ini, harus sabar-sabar sajalah mau kesini, soalnya bayar parkirnya Rp.20.000,” ujar wanita pengendara mobil tersebut dikutip pada Jumat (28 Juni 2024).

Narasi tersebut terdapat di dalam sebuah video yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 27 Juni 2024. Korban mengaku bahwa sepekan sebelumnya dia juga parkir di lokasi yang sama. Pada saat itu, uang parkir yang diminta untuk mobil sebesar Rp.10.000 ribu. Namun pada saat dia melakukan parkir di lokasi tersebut pada hari berikutnya pria yang mengaku sebagai petugas parkir itu meminta uang sebesar Rp.20.000 ribu. Pengendara mobil tersebut mengaku sangat resah atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut.

“Saya merasa sangat dirugikan meskipun hanya Rp.20.000 ribu katanya, tapi itu sudah termasuk tidak wajar. Dia (yang meminta uang) tidak ada tanda pengenal yang menunjukkan dia sebagai tukang parkir. Apalagi namanya kalau bukan pungli, ada sekitar tiga atau empat orang pelaku yang sama, cewek juga ada,” ujar pengendara mobil yang terdapat pada unggahan tersebut, dikutip dari *Detiksumut.com*.

Banyaknya kasus yang terjadi, diantaranya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lahan parkir membuat Pemerintah Kota Medan harus memikirkan sebuah inovasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan parkir tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pengelolaan pelayanan perparkiran.

Penelitian pertama oleh Dhea Khairunnisa pada tahun 2022 yang berjudul *Pengelolaan Parkir Di Kawasan Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik*. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti peningkatan prosedur pelayanan, peningkatan waktu penyelesaian, peningkatan produk pelayanan, peningkatan biaya pelayanan, peningkatan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan.

Penelitian kedua oleh William T Datchi pada tahun 2023 yang berjudul *Analisis Kualitas Pelayanan Kawasan Parkir Berbayar Di Universitas Kristen Indonesia*. Penelitian ini difokuskan kepada beberapa indikator seperti sistem pencarian informasi, pelayanan petugas parkir, assesibilitas lahan parkir, dan

keamanan serta kenyamanan penggunaan parkir di kawasan Universitas Kristen Indonesia.

Penelitian ketiga oleh Riza Phalevi Marwanto pada tahun 2024 yang berjudul *Optimalisasi Kinerja Juru Parkir Berorientasi Keselamatan Di Kabupaten Banjarnegara*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) mampu dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keselamatan juru parkir serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Penelitian keempat oleh Afrizal Zein pada tahun 2023 yang berjudul *Pengelolaan Sistem Parkir Dengan Menggunakan Long Range Rfid Reader Berbasis Arduino Uno*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan sistem parkir yang baik akan menciptakan proses pelayanan dan keamanan yang baik. Manajemen parkir yang baik membutuhkan berbagai dukungan dari berbagai komponen seperti juru parkir dan fasilitas parkir. Fasilitas parkir yang ada merupakan komputerisasi yang melayani pengguna jasa parkir dan memberikan keamanan. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah Teknologi *Radio Frequency Identification (RFID)*.

Penelitian Kelima oleh Yogi Oktopianto pada tahun 2023 yang berjudul *Peningkatan Kualitas Juru Parkir Berkeselamatan Di Kabupaten Grobogan*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa selain membutuhkan lahan parkir yang cukup kebutuhan akan kualitas juru parkir yang handal menjadi salah satu kunci terhadap pengelolaan pelayanan perparkiran. Kurangnya pengetahuan mengenai pengaturan perparkiran dan penyelenggaraan parkir berkeselamatan menjadi permasalahan yang utama dalam pelayanan parkir yang ada.

Penelitian keenam oleh Loso Judijanto pada tahun 2024 yang berjudul *Analisis Bibliometrik Tentang Kewirausahaan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi*. Di dalam penelitian yang penulis dapat dari jurnal scopus ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berdaya guna dalam mendukung praktik kewirausahaan sosial.

Penelitian ketujuh oleh Rifqi Asy'ari pada tahun 2023 yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Di dalam penelitian yang penulis ambil dari jurnal scopus ini menjelaskan bahwa pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan arah yang mendukung berjalannya motto pariwisata Indonesia. Pemberdayaan yang dilakukan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan motto pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian kedelapan oleh Agus Fatah Hidayat pada tahun 2023 yang berjudul *Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Di dalam penelitian yang penulis ambil dari jurnal scopus ini menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan publik. Gaya kepemimpinan sangat menentukan dalam proses manajemen kinerja, pemberdayaan, dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Dhea Khairunnisa pada tahun 2022 yang berjudul *Pengelolaan Parkir Di Kawasan Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik*. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti peningkatan prosedur pelayanan, peningkatan waktu penyelesaian, peningkatan produk pelayanan, peningkatan biaya pelayanan, peningkatan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh William T Datchi pada tahun 2023 yang berjudul *Analisis Kualitas Pelayanan Kawasan Parkir Berbayar Di Universitas Kristen Indonesia*. Penelitian ini difokuskan kepada beberapa indikator seperti sistem pencarian informasi, pelayanan petugas parkir, aksesibilitas lahan parkir, dan keamanan serta kenyamanan penggunaan parkir di kawasan Universitas Kristen Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Riza Phalevi Marwanto pada tahun 2024 yang berjudul *Optimalisasi Kinerja Juru Parkir Berorientasi Keselamatan Di Kabupaten Banjarnegara*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) mampu dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keselamatan juru parkir serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Zein pada tahun 2023 yang berjudul *Pengelolaan Sistem Parkir Dengan Menggunakan Long Range Rfid Reader Berbasis Arduino Uno*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan sistem parkir yang baik akan menciptakan proses pelayanan dan keamanan yang baik. Manajemen parkir yang baik membutuhkan berbagai dukungan dari berbagai komponen seperti juru parkir dan fasilitas parkir. Fasilitas parkir yang ada merupakan komputerisasi yang melayani pengguna jasa parkir dan memberikan keamanan. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah Teknologi *Radio Frequency Identification (RFID)*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yogi Oktopianto pada tahun 2023 yang berjudul *Peningkatan Kualitas Juru Parkir Berkeselamatan Di Kabupaten Grobogan*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa selain membutuhkan lahan parkir yang cukup kebutuhan akan kualitas juru parkir yang handal menjadi salah satu kunci terhadap pengelolaan pelayanan perparkiran. Kurangnya pengetahuan mengenai pengaturan perparkiran dan penyelenggaraan parkir berkeselamatan menjadi permasalahan yang utama dalam pelayanan parkir yang ada.

Dari kelima penelitian tersebut, belum ada satupun yang meneliti tentang pemberdayaan kepada juru parkir melalui sistem parkir berlangganan. Pada penelitian ini, peneliti lebih terfokus untuk meneliti pemberdayaan kepada juru

parkir untuk membantu berjalannya sebuah sistem parkir berlangganan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa penting peran dari pemberdayaan juru parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menjalankan program sistem parkir berlangganan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah program dari sistem parkir berlangganan ini dapat mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya sering terjadi seperti bentrokan antar petugas parkir yang diakibatkan oleh perebutan wilayah, parkir liar yang diakibatkan karena tidak tersedianya lahan parkir, dan pungutan liar yang diakibatkan karena petugas juru parkir belum mendapatkan upah atau gaji yang jelas.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis akan menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan tentang pemberdayaan juru parkir di pinggir jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut.

Penulis dapat memahami bahwa gambaran dari sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif ini merupakan suatu penelitian dengan mendeskripsikan, menggambarkan atau menerangkan berbagai persoalan yang didapatkan berdasarkan fakta dilapangan serta kondisi sebenarnya. Untuk itu, perlu diadakannya sebuah penelitian dan membutuhkan informan agar bisa diteliti.

Pada saat melaksanakan penelitian, penulis mencari informan dari berbagai pihak baik itu dari Dinas Perhubungan Kota Medan ataupun masyarakat sekitar Kota Medan. Informan yang penulis dapatkan sebanyak 17 orang untuk dilakukan wawancara agar dapat menggali berbagai informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian berjalan. Setelah mendapatkan berbagai data dan informasi, kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data dan informasi dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Juru Parkir Melalui Sistem Parkir Berlangganan

Menurut (Nurdin, 2017), secara etimologis istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Secara umum pemerintahan merupakan organisasi, badan, lembaga

yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan sistem parkir berlangganan di Kota Medan, dijelaskan pada Pasal 4 bahwa sasaran parkir berlangganan di tepi jalan adalah seluruh tepi jalan umum selain kawasan yang dilarang untuk tempat parkir, kemudian pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum ini dikenakan kepada seluruh kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan umum. Dalam upaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jasa sewa parkir, maka Pemerintah Kota Medan menerbitkan sistem parkir berlangganan ini dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi sebelumnya seperti banyaknya aksi parkir liar, maraknya aksi pungutan liar, dan bentrok antara juru parkir yang memperebutkan kawasan parkir.

Menurut (Simangunsong, 2017), menjelaskan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian menurut (Nurdin, 2024), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. MSDM tidak hanya sekedar terfokus pada perekrutan, pelatihan, dan pemeliharaan tenaga kerja, tetapi juga mencakup strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, termotivasi, dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan menurut (Sadu, 2001), menjelaskan bahwa pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Sejauh ini, sejak diberlakukannya sistem parkir berlangganan di Kota Medan ada sekitar 59.865 jumlah kendaraan yang telah melakukan parkir berlangganan dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pihak penyelenggara yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri terus mengevaluasi kebijakan sistem parkir berlangganan ini salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan kepada seluruh petugas juru parkir yang ada dengan melakukan kerja sama oleh pihak ketiga atau vendor. Adapun data dari jumlah petugas juru parkir yang dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui sistem parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

Data Jumlah Juru Pakir

| No | Perusahaan | Jumlah Jukir |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | PT. Bintang Pertama Makmur | 350 |
| 2 | PT. Sentral Parkir Jaya | 115 |
| 3 | PT. Logika Garis Elektronik | 97 |
| 4 | CV. Citra Pembaharuan Utama | 30 |
| 5 | PT. Lalupa Karona Ternalem | 97 |
| 6 | CV. Ajera Berkah Bersatu | 87 |
| 7 | CV. Semangat Anugerah | 87 |
| 8 | CV. Putra Raja Cakrawala | 20 |
| 9 | PT. Berkah Wira Garuda | 16 |
| 10 | CV. Daniel Lidya Mandiri | 14 |
| 11 | CV. Moza Sejahtera | 7 |
| Jumlah Total | | 920 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Pihak vendor yang dimaksud merupakan sebuah perusahaan terkait yang mendukung berjalannya kebijakan parkir berlangganan ini, pemberdayaan yang dilakukan yaitu pembeberian upah atau gaji kepada petugas juru parkir, memberikan pembekalan seperti sosialisasi atau pelatihan yang rutin, serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana seluruh petugas juru parkir untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sosialisasi dan pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada petugas juru parkir pada saat melaksanakan tugas dalam kebijakan sistem parkir berlangganan itu sendiri.

Menurut teori pemberdayaan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh (Priansa, 2016) terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan itu sendiri, adapun keempat faktor itu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Individu
2. Motivasi
3. Latihan
4. Laporan Kemajuan

Uraian dari tiap dimensi tentang pemberdayaan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Perbedaan Individu

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah II pada hari Kamis, 9 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Kalau berkaitan dengan latar belakang pendidikan, rata-rata para petugas juru parkir ini memiliki latar belakang tidak berpendidikan atau tidak sekolah. Oleh karena itu, kami lebih sering memanfaatkan pemuda setempat untuk di karyakan sebagai petugas juru parkir. Selain untuk memberikan kepada mereka lapangan pekerjaan,

diharapkan juga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan negatif kedepannya.

Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah I pada hari Kamis, 9 Januari 2025 yang mengatakan bahwa:

Ya memang benar, untuk para petugas juru parkir sendiri kami lebih senang memanfaatkan para pemuda setempat untuk di karyakan. Selain mereka lebih memahami situasi dan kondisi di lapangan diharapkan mereka juga dapat melakukan kegiatan yang positif pada saat berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau untuk rentan usianya, rata-rata para petugas juru parkir yang ada berusia sekitar 30 sampai 40 tahun ke atas. Kami melakukan pendataan terhadap jumlah mereka dan kami memberikan upah kepada mereka setiap bulannya agar mereka juga memiliki penghasilan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Wawancara tersebut juga didukung dengan data rata-rata jumlah usia juru parkir yang penulis dapat dan diolah untuk melengkapi informasi penelitian ini, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun jenjang usia juru parkir adalah sebagai berikut:

Data Jenjang Usia Juru Parkir

| No | Perusahaan | Usia | Jumlah Jukir |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | PT. Bintang Pertama Makmur | 28-38 Tahun | 350 |
| 2 | PT. Sentral Parkir Jaya | 31-37 Tahun | 115 |
| 3 | PT. Logika Garis Elektronik | 35-39 Tahun | 97 |
| 4 | CV. Citra Pembaharuan Utama | 35-41 Tahun | 30 |
| 5 | PT. Lalupa Karona Ternalem | 29-31 Tahun | 97 |
| 6 | CV. Ajera Berkah Bersatu | 37-43 Tahun | 87 |
| 7 | CV. Semangat Anugerah | 30-37 Tahun | 87 |
| 8 | CV. Putra Raja Cakrawala | 36-40 Tahun | 20 |
| 9 | PT. Berkah Wira Garuda | 31-38 Tahun | 16 |
| 10 | CV. Daniel Lidya Mandiri | 35-42 Tahun | 14 |
| 11 | CV. Moza Sejahtera | 33-35 Tahun | 7 |
| Jumlah Total | | 28-43 Tahun | 920 |

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan individu yang dimiliki oleh seluruh petugas juru parkir, seperti latar belakang pendidikan dan jenjang usia yang dimiliki selain untuk membantu memudahkan pendataan juga berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda setempat agar mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan yang pasti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.1.2 Motivasi

Berdasarkan pada konsep tersebut, maka dapat diketahui bahwa motivasi para pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan ialah berhubungan dengan semangat kinerja didasari oleh beberapa faktor pendukung yang diberikan kepada seluruh petugas di lapangan. Adapun faktor pendukung dalam meningkatnya sebuah motivasi adalah sebagai berikut:

a) Upah Atau Gaji

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Kepala Sesi Wilayah Perparkiran I pada hari Senin, 6 Januari 2025 untuk mengetahui bagaimana upah atau gaji yang diberikan kepada seluruh petugas juru parkir yang ada di lapangan dengan menggunakan sistem parkir berlangganan, beliau mengatakan bahwa:

Mengenai upah atau gaji, sebenarnya kita sudah memberikan upah kepada seluruh petugas juru parkir yang ada di lapangan dan itu memang merupakan arahan dari Pemko Medan sendiri. Gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.2.500.000 perbulan yang bersumber dari APBD Kota Medan, tujuannya agar petugas juru parkir ini mendapatkan penghasilan yang jelas dan mengatasi permasalahan yang sering terjadi sebelumnya seperti pungutan liar, bentrokan, dan perebutan wilayah kawasan parkir tersebut. Jadi melalui sistem parkir berlangganan ini, selain bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sempat terjadi sebelumnya juga memiliki tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dari para petugas juru parkir yang ada.

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Sesi Wilayah Perparkiran Khusus di hari yang sama Senin, 6 Januari 2025 yang mengatakan bahwa:

Iya, kami benar memberikan upah atau gaji kepada seluruh petugas juru parkir yang ada di lapangan pada sistem parkir berlangganan ini. Selain ini merupakan program dari Pemko Medan, pemberian upah atau gaji ini saya rasa sangat penting untuk meningkatkan motivasi kinerja petugas yang ada di lapangan sekaligus menertibkan para petugas juru parkir agar tidak mengulangi permasalahan seperti sebelumnya.

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pemberian upah atau gaji kepada seluruh petugas juru parkir yang ada di wilayah Kota Medan melalui sistem parkir berlangganan tersebut. Sehingga dengan adanya pemberian

upah tersebut dapat meningkatkan motivasi seluruh petugas juru parkir kedepannya.

b) **Perlengkapan fasilitas**

Selanjutnya perlengkapan fasilitas sangat penting untuk menunjang kinerja petugas juru parkir agar menghasilkan kualitas yang baik. Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Kepala Sesi Wilayah II pada hari Selasa, 7 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Kalau soal pemberian fasilitas seperti bed nama, rompi, ataupun tanda pengenal lainnya, itu semuanya kami serahkan kepada pihak vendor. Semuanya vendor yang menyediakan dan kami cenderung melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem parkir berlangganan di lapangan.

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh para petugas juru parkir yang berada di kawasan Jalan Palangkaraya Kota Medan pada hari Rabu, 8 Januari 2025. Mereka mengatakan bahwa:

Iya memang benar kami mendapatkan berbagai fasilitas pengenal seperti bed nama, ropi, topi, dan berbagai alat mengenal lainnya. Ya sebenarnya fasilitas ini merupakan benda wajib yang seharusnya disediakan untuk memberikan tanda kepada seluruh juru parkir yang ada bahwasanya kami ini legal dalam menjalankan tugas.

Wawancara tersebut juga diperkuat dengan data penunjang untuk memperkuat informasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan, data tersebut berupa berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan oleh petugas parkir. adapun data-data fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Data Fasilitas Parkir

| No | Daftar Fasilitas |
|----|-----------------------|
| 1. | Kartu Tanda Anggota |
| 2. | Bed nama |
| 2. | Rompi/Seragam |
| 3. | Topi |
| 4. | Peluit |
| 5. | Surat Tugas |
| 6. | BPJS Ketenaga Kerjaan |

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data dan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa pemberian perlengkapan fasilitas kepada seluruh petugas juru parkir sangat penting karena dapat mempermudah petugas juru parkir dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian petugas juru parkir akan memiliki motivasi dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

3.1.3 Latihan

Peneliti telah melakukan pengamatan selama 15 hari kerja mengenai keterampilan para petugas juru parkir pada saat melaksanakan sistem parkir berlangganan. Pelatihan yang terstruktur, dibarengi dengan budaya berbagi pengetahuan dan peningkatan kualitas kehidupan kerja, secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja (Tamsah;, 2021). Menurut peneliti pemberian pelatihan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi, perilaku, dan sikap yang ditunjukkan oleh para petugas juru parkir melalui upaya latihan diawali dengan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kerja di lapangan dalam menjalankan sistem parkir berlangganan tersebut.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan perparkiran aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pengguna jasa parkir berlangganan di Kota Medan. Sehingga target-target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dapat tercapai sebagaimana mestinya melalui sistem parkir berlangganan ini. Adapun tujuan dari pemberian latihan ini adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Kompetensi Diri

Latihan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan kepada seluruh juru parkir yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam menjalankan sistem parkir berlangganan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari Bapak Kepala Sesi Wilayah Perparkiran I pada hari Selasa, 7 Januari 2025 yang mengatakan bahwa:

Secara umum, pelatihan yang kami berikan kepada seluruh petugas juru parkir ini agar mereka mampu memahami dan menguasai medan yang ada. Hanya saja, kami lebih menyerahkan setiap tahapan pelatihan itu kepada pihak ketiga atau vendor untuk mengontrol jalannya pelatihan tersebut. Namun kami tetap mengawasi setiap petugas juru parkir yang ada dan kami hitung jumlahnya agar sesuai dengan data yang kami miliki saat ini.

Selanjutnya pernyataan tersebut juga di dukung oleh Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah II pada hari yang sama Selasa, 7 Januari 2025 yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya diklat dengan pelatihan 5 hari itu kan sama aja artinya. Namun disini kan kita memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan kepada seluruh petugas juru parkir yang ada agar mereka bisa lebih memahami terkait tugas yang akan dijalankan pada saat di lapangan nanti. Sehingga harapannya apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dapat tercapai dan masyarakat juga merasakan dampak positifnya.

Penulis juga melengkapi informasi dengan data diklat yang diberikan kepada petugas juru parkir, adapun berbagai diklat yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Data Daftar Diklat Juru Parkir

| No | Daftar Diklat |
|-----------|---------------------------------|
| 1. | Manajemen Pelayanan Perparkiran |
| 2. | Penerapan <i>e-parking</i> |
| 3. | Pelatihan <i>Safety Riding</i> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Sebagaimana data dan hasil dari wawancara yang peneliti laksanakan, dapat dipahami bahwasanya pelatihan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kompetensi para juru parkir yang ada di lapangan. Karena dengan adanya pelatihan ini, seluruh juru parkir yang ada dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

b) Membentuk Sikap Dan Perilaku

Selain meningkatkan kompetensi diri, pelatihan atau diklat yang diberikan kepada seluruh petugas juru parkir pada sistem parkir berlangganan ini juga memiliki tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas sebagai juru parkir. Sebagaimana dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah I pada hari Rabu, 8 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Memang benar, tujuan diberikannya pelatihan kepada seluruh juru parkir yang ada di lapangan ini agar mereka memiliki sikap dan perilaku yang baik pada saat menjalankan tugas pelayanan perparkiran kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Sehingga dengan adanya pelatihan ini mereka lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya dan harapan kedepannya dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat pengguna jasa sewa parkir di Kota Medan.

Pernyataan ini juga didukung oleh sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa:

Semenjak adanya sistem parkir berlangganan ini saya merasakan lebih tertib dan lebih mudah dari sebelumnya. Karena kita ketahui sebelumnya kalau membahas tentang parkir ini akan pasti banyak kaitannya dengan pungutan liar, bentrok dan lain sebagainya. Tapi setelah adanya parkir berlangganan ini sudah jauh ada perubahan baik itu dari segi masyarakat yang merasakan kemudahan ataupun dari segi pelaksanaannya yang lebih tertib.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan, pelatihan yang diberikan kepada seluruh petugas juru parkir bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi serta membentuk sikap dan perilaku dari juru parkir itu sendiri. Sebelum melaksanakan pelatihan, Dinas Perhubungan Kota Medan terlebih dahulu memberikan semacam sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kerja kepada seluruh petugas juru parkir yang ada. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Kepala Sesi Wilayah Perparkiran II saat penulis melaksanakan wawancara pada hari Senin, 7 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Pemberdayaan jukir benar dilakukan yang bertujuan untuk mendukung dari sistem parkir berlangganan ini agar berjalan lancar sebagai mana mestinya. Kami melakukan pemberdayaan kepada jukir ini dengan dibantu oleh pihak ketiga (vendor), vendor itu merupakan Perusahaan swasta yang ada di Kota Medan. Kami menyerahkan setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan baik itu dari sosialisasi, pelatihan penggunaan perlengkapan fasilitas, sampai simulasi kerja kepada pihak vendor namun kami tetap melakukan pengawasan dan meminta laporan perkembangan dari mereka.

Dengan demikian setiap tugas yang diberikan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Harapannya masyarakat dapat merasakan kenyamanan dari pelayanan perparkiran yang diberikan melalui sistem parkir berlangganan tersebut.

3.1.4 Laporan Kemajuan

Pemerintah Kota Medan menerapkan sistem parkir berlangganan yang dilaksanakan di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Medan diharapkan dapat berjalan baik dan mampu mencapai target sebagaimana mestinya. Karena sebagaimana kita ketahui, mengenai kondisi perparkiran yang ada di Kota Medan sering mengalami permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan menerapkan kebijakan sistem parkir berlangganan ini agar permasalahan yang sebelumnya sering terjadi tidak terulang kembali. Kemudian untuk memastikan sistem parkir berlangganan ini berjalan sebagaimana

mestinya, tentu saja memerlukan upaya dari pihak pengelola yaitu Dinas Perhubungan itu sendiri seperti pengawasan dan evaluasi yang rutin.

Pada penelitian ini, penulis mengambil salah satu sampel di wilayah kawasan Jalan Palangkaraya Kota Medan, pada kawasan tersebut memiliki data petugas parkir sebanyak 46 orang juru parkir yang terbagi ke dalam 23 wilayah kawasan parkir berbeda. Jika dilihat dari data tersebut, para petugas juru parkir dibagi sesuai dengan jumlah wilayah yang ada di kawasan tersebut. Pembagian wilayah itu dilihat dari luas wilayah dan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pada saat jam operasional kerja, para petugas juru parkir dibagi menjadi dua *shift* kerja. Adapun pembagian jam kerjanya adalah sebagai berikut:

Data Shift Kerja Juru Parkir

| No | Jam Kerja | Jumlah Juru Parkir |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pagi-Siang (08.00-13.00 WIB) | 23 Orang |
| 2. | Sore-Malam (14.00-20.00WIB) | 23 Orang |

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan pada konsep tersebut, maka diperlukan sebuah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengontrol keberlangsungan program sistem parkir berlangganan agar program tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, dapat diketahui bahwa untuk memastikan program berjalan sebagaimana mestinya harus memerlukan suatu pengawasan yang rutin dari pihak penyelenggara program tersebut. Dalam hal ini pihak penyelenggara itu adalah Dinas Perhubungan Kota Medan, upaya pengawasan rutin dilakukan agar program parkir berlangganan ini dapat berjalan dengan konsisten dan mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan kepada Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah Khusus pada hari Rabu, 8 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Untuk pengawasan sendiri, kami rutin melakukan pengawasan itu setiap seminggu sekali. Kami membagi menjadi beberapa tim yang menyebar ke berbagai wilayah yang diberlakukan sistem parkir berlangganan untuk memastikan para petugas juru parkir yang ada di lapangan mampu menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Selain itu, kami juga rutin melakukan koordinasi dengan pihak ketiga atau vendor guna membahas terkait

perkembangan ataupun kendala yang sering terjadi pada saat pelaksanaan sistem parkir berlangganan tersebut.

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh para petugas juru parkir yang berada di kawasan Jalan Palangkaraya Kota Medan, mereka mengatakan bahwa:

Iya benar, biasanya pihak dari Dinas Perhubungan rutin melakukan pengawasan kepada kami. Mereka biasanya keliling sekitar seminggu sekali atau bahkan dua kali dalam seminggu ke berbagai kawasan yang telah diberlakukan sistem parkir berlangganan untuk memastikan program tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Mereka juga rutin menanyakan kepada kami terkait permasalahan atau kendala yang sering terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pernyataan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan ataupun dari petugas juru parkir itu sendiri dibenarkan adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan untuk memastikan program sistem parkir berlangganan ini berjalan sebagaimana mestinya.

b) Evaluasi

Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan adalah evaluasi, evaluasi biasanya dilakukan untuk membahas berbagai faktor yang terjadi di lapangan baik itu faktor kendala dan Solusi untuk mengatasi faktor kendala tersebut. Evaluasi ini sangat penting dilakukan agar kedepannya setiap kekurangan dan permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki sehingga program parkir berlangganan yang berjalan semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengguna jasa sewa parkir di Kota Medan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah I dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan pada hari Rabu, 8 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

Tentu saja kami melakukan upaya evaluasi dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki berbagai permasalahan dan kekurangan pada saat program parkir berlangganan ini berjalan. Upaya evaluasi yang kami lakukan ini biasanya rutin dalam seminggu sekali. Kami juga menghadirkan baik itu dari pihak ketiga atau vendor hingga kepada perwakilan dari petugas juru parkir di lapangan untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh petugas juru parkir yang ada di Jalan Palangkaraya Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

Kalau berkaitan dengan evaluasi, saya memang sempat diundang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan untuk membahas tentang perkembangan dari sistem parkir berlangganan tersebut. Tapi saya mengikutinya hanya sekali saja, mungkin yang menghadiri kegiatan evaluasi itu hanya sebagian saja dari perwakilan petugas juru parkir di tiap wilayah yang ada.

Selain kegiatan wawancara, penulis juga mendapatkan beberapa hal yang harus dievaluasi berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Adapun hal-hal yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

Data Evaluasi

| No | Evaluasi |
|----|---|
| 1. | Kendala jaringan |
| 2. | Masih ada juru parkir yang mengutip secara langsung |
| 3. | Sering terjadi keterlambatan dalam pemberian upah |
| 4. | Kurangnya sosialisasi |

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui berbagai permasalahan dan mencari Solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga kedepannya kekurangan dari sistem parkir berlangganan ini dapat diperbaiki dan lebih baik dari waktu ke waktu.

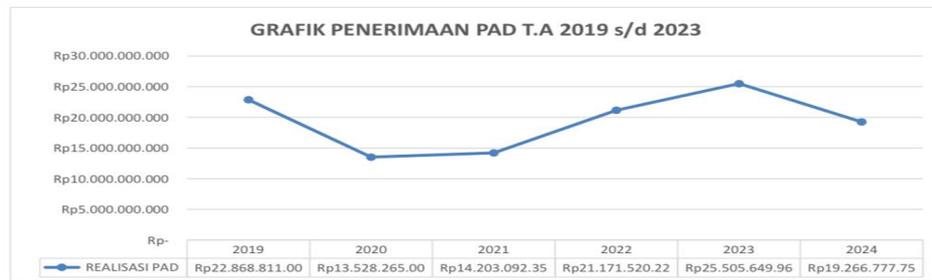
Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengawasi dan mengevaluasi sistem parkir berlangganan, terdapat sebuah perkembangan yang dijadikan sebagai acuan untuk keberlangsungan sistem parkir berlangganan ini kedepannya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari data pendapatan retribusi parkir Kota Medan pada tahun 2024 dan juga beberapa tahun belakangan ini, yaitu sebagai berikut:

Data PAD Parkir Kota Medan

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN |
|----|-------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1. | 2019 | Rp.50.462.600.000 | Rp.22.868.811.000 | 45% | |
| 2. | 2020 | Rp.22.746.802.000 | Rp.13.528.265.000 | 59% | |
| 3. | 2021 | Rp.31.079.575.450 | Rp.14.203.092.359 | 46% | |
| 4. | 2022 | Rp.36.871.073.058 | Rp.21.171.520.222 | 57% | |
| 5. | 2023 | Rp.51.871.073.058 | Rp.25.505.649.962 | 49% | |
| 6. | 2024 | Rp.67.417.685.558 | Rp.19.266.777.759 | 29% | 59.865 kendaraan |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Grafik Penerimaan PAD



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa beberapa tahun belakangan ini PAD retribusi parkir Kota Medan tidak mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Namun dari beberapa tahun belakangan ini, target tertinggi dan pencapaian terendah dari PAD retribusi parkir Kota Medan adalah pada tahun 2024 ini.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Parkir Berlangganan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis laksanakan selama melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan sistem parkir berlangganan baik itu dari segi internal ataupun eksternal. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan sistem parkir berlangganan ini menurut bapak Kepala Sesi Perparkiran Wilayah I pada hari Jumat, 10 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Sebenarnya kalau kita membahas tentang hambatan itu pasti ada saja, pada saat ini yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan sistem parkir berlangganan ini adalah masih banyak juru parkir yang mengutip kepada pengguna jasa sewa parkir di lapangan. Selain itu, kalau dari segi internal kami sendiri target yang diberikan oleh Pemko Medan itu terlalu tinggi. Sehingga kami juga bingung gimana caranya untuk mencapai target tersebut. karena disini kan kita juga bekerja dengan pihak vendor, mereka juga ada biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan berbagai fasilitas perlengkapan yang di butuhkan. Kalau kami kasi target yang terlalu tinggi juga kasian di mereka istilahnya mereka kan juga mau mengambil keuntungan dari sini.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan dari masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Jalan Brigjen Katamso pada hari Sabtu, 11 Januari 2025. Berdasarkan keterangan dari masyarakat, mereka mengatakan bahwa:

Kalau yang kami rasakan selama berlangsungnya sistem parkir berlangganan ini sebenarnya bagus karena ini juga merupakan upaya agar masyarakat merasakan kemudahan dan untuk mencegah berbagai permasalahan yang sering terjadi sebelumnya. Hanya saja, informasi atau bahkan sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara seperti Dinas Perhubungan Kota Medan dan pihak vendor itu tidak merata keseluruh masyarakat kota medan. Sehingga masih banyak sebenarnya masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang sistem parkir berlangganan ini, hal ini menjadi kesempatan kepada juru parkir yang berada dilapangan untuk mengutip lagi uang parkir kepada mereka.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti informasi yang tidak merata kepada masyarakat, masih banyaknya juru parkir yang melakukan pengutipan, dan target yang ditetapkan oleh Pemko Medan yang terlalu tinggi. Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kota Medan agar kedepannya pelaksanaan sistem parkir berlangganan ini bisa lebih baik.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melaksanakan Parkir Berlangganan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan pada saat melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai termasuk staf yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan. Dari hasil yang didapatkan kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan sistem parkir berlangganan tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Kassubag Perencanaan pada hari Senin, 13 Januari 2025. Beliau mengatakan bahwa:

Upaya yang kami lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan sistem parkir berlangganan ini adalah yang pertama itu kami melakukan monitoring atau pengawasan yang rutin setiap minggunya, kemudian yang kedua kami rutin melaksanakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan sistem parkir berlangganan ini dan kami juga mengundang perwakilan dari petugas juru parkir yang ada, selanjutnya kami meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi tentang sistem parkir berlangganan ini sampai kepada masyarakat yang ada di pinggiran Kota Medan secara merata.

Pendapat ini juga didukung dari pernyataan beberapa staf yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan, mereka mengatakan bahwa:

Kalau terkait upaya yang kami lakukan seperti monitoring dan melakukan rapat evaluasi secara rutin itu memang benar kami lakukan. Kami juga

sering berkoordinasi dengan pihak ketiga yang menjadi vendor untuk membahas berbagai perkembangan atau pun hambatan terhadap keberlangsungan sistem parkir berlangganan ini.

Dari hasil wawancara tersebut, bisa diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan adalah melakukan evaluasi dan monitoring rutin setiap minggu dan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mengetahui informasi terkait sistem parkir berlangganan ini. Sehingga sistem parkir berlangganan ini berjalan lancar dan mampu mencapai target sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kota Medan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepada juru parkir pada sistem parkir berlangganan ini terbukti efektif untuk membantu berjalannya sistem parkir berlangganan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Khairunnisa (2022), yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibutuhkan beberapa upaya seperti peningkatan prosedur pelayanan, peningkatan waktu penyelesaian, peningkatan produk pelayanan, peningkatan biaya pelayanan, peningkatan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan. Namun, meskipun ada peningkatan dari kualitas prosedur dan pelayanan, masih terdapat tantangan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh William T. Datchi (2023) juga mendukung temuan ini, dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir berbayar memerlukan beberapa indikator seperti sistem pencarian informasi, pelayanan petugas parkir, aksesibilitas lahan parkir, dan keamanan serta kenyamanan penggunaan parkir. Hal ini menunjukkan meskipun ada kesamaan dalam hasil, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Riza Phalevi Marwanto (2024) menunjukkan bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) mampu dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keselamatan juru parkir serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pelatihan atau diklat berperan penting untuk mendukung berjalannya suatu program kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Zein pada tahun (2023) Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan sistem parkir yang baik akan menciptakan proses pelayanan dan keamanan yang baik. Manajemen parkir yang baik membutuhkan dukungan fasilitas parkir untuk melayani pengguna jasa parkir dan memberikan keamanan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun ada penggunaan teknologi, perlu diadakn pelatihan sebagai bekal terhadap penguasaan teknologi tersebut.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Yogi Oktopianto (2023), pada penelitian ini menjelaskan bahwa selain membutuhkan lahan parkir yang cukup kebutuhan akan kualitas juru parkir yang handal menjadi salah satu kunci terhadap pengelolaan pelayanan perparkiran. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya lahan parkir menyebabkan berbagai permasalahan, sehingga membutuhkan petugas juru parkir yang handal dan berkualitas untuk menjalankan sistem parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Secara keseluruhan, meskipun pemberdayaan juru parkir melalui sistem parkir berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan menunjukkan efektivitas yang baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti uoaya terhadap pencapaian target PAD Kota Medan, keterlambatan dalam pemberian upah kepada petugas parkir, dan masih ada petugas yang melakukan pengutipan uang kepada pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan relevansi pelatihan dan memfasilitasi petugas juru parkir terhadap pengembangan sistem parkir berlangganan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dilapangan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan juru parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi terhadap keberlangsungan sistem parkir berlangganan di Kota Medan. Namun efektivitas dari pemberdayaan itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti masih terjadinya pengutipan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir, keterlambatan dalam pemberian upah kepada petugas parkir, dan tidak tercapainya target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Guna menanggapi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan upaya strategis seperti meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi tegas kepada petugas juru parkir yang melanggar aturan dan lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bergabung ke dalam sistem parkir berlangganan sehingga target PAD Kota Medan dapat terpenuhi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan informan. Penelitian hanya dilakukan di satu instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai model studi kasus yang dipilih.

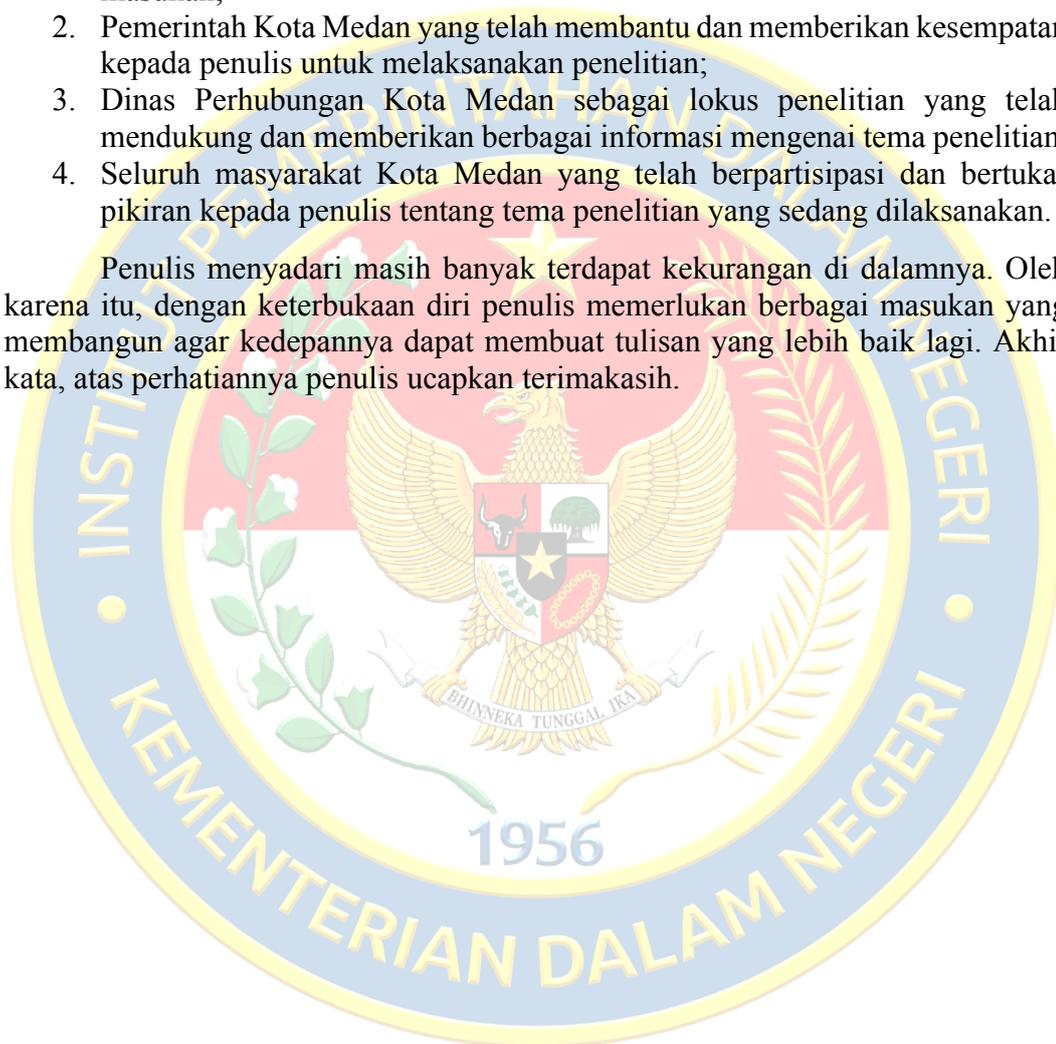
Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dikemudian hari.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak dibantu oleh berbagai pihak yang mendukung terlaksananya penelitian, diantara pihak tersebut adalah:

1. Segecap civitas akademika IPDN, dosen pembimbing, dan dosen penguji yang telah membantu penulis dalam memberikan berbagai saran dan masukan;
2. Pemerintah Kota Medan yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian;
3. Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai lokus penelitian yang telah mendukung dan memberikan berbagai informasi mengenai tema penelitian.
4. Seluruh masyarakat Kota Medan yang telah berpartisipasi dan bertukar pikiran kepada penulis tentang tema penelitian yang sedang dilaksanakan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan keterbukaan diri penulis memerlukan berbagai masukan yang membangun agar kedepannya dapat membuat tulisan yang lebih baik lagi. Akhir kata, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.



VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Buku

- Asy'ari R, Putra R *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education (2023) 10(1) 19-30*
- Dachi, W. T., Ndruru, E., Giawa, H., & ... (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Kawasan Parkir Berbayar di Kampus Universitas Kristen Indonesia.
- Eaton, S. E., Stoesz, B. M., Crossman, K., Garwood, K., & McKenzie, A. (2022). Faculty perspectives of academic integrity during COVID-19: A mixed methods study of four Canadian universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 52(3), 42–58. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85148644054>
- Fatah, A., Sekolah, H., Ilmu, T., Yppt, A., & Tasikmalaya, P. (n.d.). *Efek Size Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3, 4018–4025.
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.
- Ismail Nurdin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Mengelola Talenta Untuk Kinerja Optimal*, MPI Book, 2024
- Judijanto L, Rijal S, Harsono I: *Analisis Bibliometrik tentang Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi (2024) 314-322*
- Khairunnisa, D. (2022). *Pengelolaan parkir kendaraan di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik*.
- Marwanto, R. P., Aprianto, R., & ... (2024). OPTIMALISASI KINERJA JURU PARKIR BERORIENTASI KESELAMATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.
- Oktopianto, Yogi. 2023, Peningkatan Kualitas Juru Parkir Berkeselamatan Kabupaten Grobogan.
- Sadu Wasistiono, 2001, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alqa Print
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Tamsah, H., Ali, H., Gani, M., Daraba, D., Salam, R., & Saleh, S. (2021). Training, Knowledge Sharing, and Quality of Work-Life on Civil Servants Performance in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural*

Studies, 8(1), 1–15.
<https://www.ejecs.org/index.php/JECS/article/view/514>

Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>

Zein, Afrizal. 2023, Pengelolaan Sistem Parkir Dengan Menggunakan Long Range RFID Reader Berbasis Arduino. |*Jurnal Ilmu Komputer JIK (2023) 02*

B. Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 3 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Internet dan Sumber Lainnya

<https://Medankota.bps.go.id.com>

<https://portal.medan.go.id.com>

<https://www.hukumonline.com>

<https://news.detik.com>

<https://news.com>

<https://detiksumut.com>

<https://kompas.com>

<https://medanku.com>

<https://medantalk.com>